

JURNAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh :

Zusana Cicilia Kemala Humau

NPM : 100510237

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh :

Zusana Cicilia Kemala Humau

NPM : 100510237

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disejutui,

Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 11 Desember 2013

Dr. Al. Wisnubroto, SH. M.Hum

- I. Judul tugas akhir: Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- II. Nama Mahasiswa: Zusana Cicilia Kemala Humau. Nama Pembimbing: Al. Wisnubroto.
- III. Program studi: Ilmu Hukum, Fakultas: Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- IV. Abstrak

ABSTRACT
**THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN
RESOLVING CRIMINAL CASES CONDUCTED BY CHILDREN
BEFORE THE IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER
11 OF 2012 ON CHILD CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM**

By: Zusana Cicilia Kemala Humau

This research was aimed to know the outlines of diversion on child criminal jurisdiction system, and also to know the implementation of diversion in resolving child cases in each criminal case resolution stage. This was a normative method research namely a research that examines provisions in the regulations in accordance to examine consistence and synchronization of regulation implementation with the reality. A diversion was a children case resolution transfer from a criminal jurisdiction to a process out of criminal jurisdiction. In the children criminal jurisdiction system, diversion was an important subject due to with diversion existence the child were expected to be avoidable from a negative stigma on a criminal jurisdiction system. Before the implementation of Regulation Number 11 of 2012 on Children Criminal Jurisdiction System, diversified implementation in child criminal jurisdiction system was very minimal. Diversion was only implemented wholly in an observation stage. In the prosecution and session stages, the public prosecutors and the judges did not dare to implement diversion as a child case resolution form at all due to both the public prosecutors as well as the judges reasoned that they had no legal principles to conduct diversion whereas they could conduct diversion by interpreting regulations and also optimizing each authority. The public prosecutors could optimize their discrete authority and their opportunity rights as what regulated in Criminal Acts and Regulation Number 16 of 2004 on State Prosecution Office of Republic of Indonesia,

while the judges should be able to conduct diversion by interpreting and optimizing Regulation Number 48 of 2009 on Judge Power.

Keywords: *Juveneli Delinquency, Child Protection, Diversion.*

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak

harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.¹ Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, disebut Diversi. Diversi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, akan tetapi undang-undang tersebut baru akan berlaku efektif tahun 2014, meskipun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru akan berlaku efektif tahun 2014, seharusnya mulai saat ini para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah harus

¹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

mempunyai semangat untuk menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan Diversi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi ide diversi dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana?

VI. Isi Makalah

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia, pengertian mengenai anak belum serempak dan masih sangat bervariasi. Khusus dalam lingkup hukum pidana, pengertian mengenai anak juga masih sangat banyak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikategorikan menjadi dua, yakni:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Tindak Pidana Anak

Secara harafiah, tindak pidana anak berarti suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pengertian tindak pidana tidak bisa terlepas dari pengertian tindak pidana secara umum. Pengertian tindak pidana sendiri sangat banyak dan bervariasi. Istilah Tindak Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah *Strarbaarfeit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak. Istilah kenakalan anak ini mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²

² M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, faktor-faktor tersebut yaitu: ³ Faktor lingkungan, Faktor sosial ekonomi dan Faktor psikologi.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam berbagai Undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 3 undang-undang ini, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam proses sistem peradilan pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib didampingi. Pendampingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu: ⁴ Aspek Psikologis dan Medis, Aspek Sosial serta Aspek Yuridis.

³ A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32-45.

⁴ Hasil wawancara dengan Pranawa, SH. Selaku pendamping anak di LPA DIY pada tanggal 02 Oktober 2013.

5. Keadilan Restoratif / *Restorative Justice*

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak dan diversi sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam konsep keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban secara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdiskusi.

B. Penjabaran Ide Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Tujuan dan Manfaat Diversi

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:⁵

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;
- b. Memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari;
- d. Melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anak-anak untuk membuat suatu keputusan;
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban;
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- g. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

⁵ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 60

3. Landasan Hukum Penggunaan Diversi

Berikut ini adalah tabel landasan hukum penggunaan diversi berdasarkan analisis dan pendapat para narasumber dan penulis.

No.	Aparat Penegak Hukum	Sebelum berlakunya UU No.11 tahun 2012		UU NO. 11 tahun 2012
		Menurut Narasumber	Menurut Penulis	
1.	Penyidik	<ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 5 Undang-Undang 3 Nomor Tahun 1997➤ Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP.➤ Pasal 13 huruf (a) Keputusan Bersama➤ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No.1 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 5 Undang-Undang 3 Nomor Tahun 1997➤ Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP.➤ Pasal 13 huruf (a) K Bersama tahun 2009.➤ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No.1 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 7➤ Pasal 96
2.	Penuntut Umum	Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 14 ayat (1) huruf h KUHP.➤ Pasal 35 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.	<ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 7➤ Pasal 96
3.	Hakim	Tidak ada.	Pasal 5 ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009.	Pasal 7

4. Jenis-jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis, yaitu: ⁶

- a. Peringatan
- b. Diversi Informal
- c. Diversi Formal.

5. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi

⁶ *Ibid.* Hlm. 63.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

6. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.

b. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

c. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.

C. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Tahap Penyidikan

Jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak penyidik sudah memberlakukan diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, diversi merupakan hal yang diutamakan.

Berikut ini adalah tabel data penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang peneliti dapat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sleman mulai dari bulan Januari – September 2013:

No.	Jenis Tindak	Proses Penyelesaian				Jumlah
		Diversi	Penyidikan	Penuntutan	Persidangan	
1.	Pencabulan	-	2 kasus	-	2 kasus	4 kasus
2.	KDRT	1 kasus	-	-	-	1 kasus
3.	Pengeroyokan	1 kasus	-	-	-	1 kasus
4.	Penganiayaan	-	2 kasus	-	-	2 kasus
	Jumlah					8 kasus

Dari jumlah data di atas dapat dilihat bahwa, dari 8 (delapan) kasus yang ada hanya 2 (dua) kasus saja yang diselesaikan melalui diversi. Hal ini berarti, untuk penerapan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di tahap penyidikan masih belum maksimal.

2. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Tahap Penuntutan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Sleman, dapat dikemukakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak belum pernah sekalipun diselesaikan melalui diversi. Hal ini terjadi karena, jaksa penuntut merasa bahwa belum ada landasan hukum yang mengharuskan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak harus diselesaikan melalui diversi.

3. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Tahap Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Sleman, dapat dikemukakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di pengadilan, belum pernah sekalipun diselesaikan melalui diversi. Hal ini sama dengan keadaan yang terjadi di tahap penuntutan karena, hakim juga merasa bahwa belum ada landasan hukum yang mengharuskan

penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak harus diselesaikan melalui diversi.

VII. Kesimpulan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diversi. Padahal, seharusnya penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan kewenangan masing-masing.

VIII. Daftar Pustaka

- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32-45.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153.